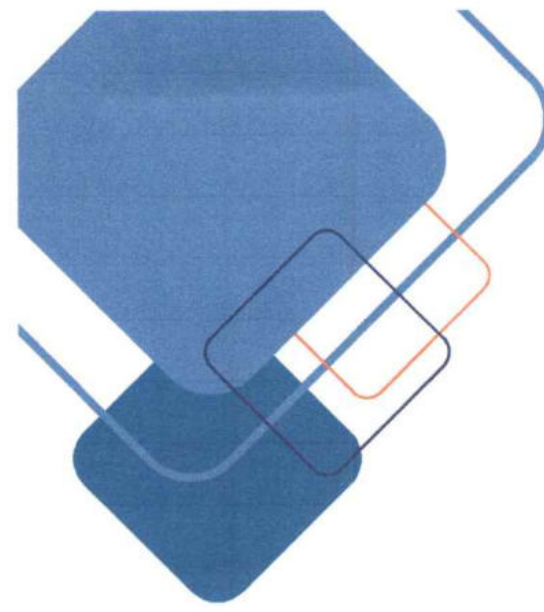
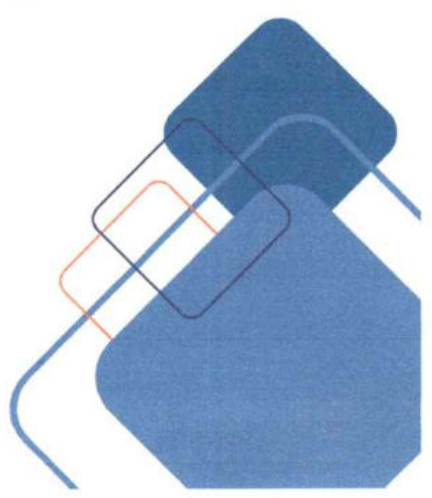




PERUBAHAN RENCANA KERJA (P-RENJA) TAHUN 2024



**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
KOTA PANGKAL PINANG**



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Perubahan Renja Tahun 2024 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkal Pinang dapat diselesaikan.

Mendasari ketentuan pada Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024-2026, Rencana Kerja ini sesungguhnya telah mencerminkan komitmen membangun daerah dalam tataran partisipatif, sinkronisasi, dan keberpihakan *stakeholder* terhadap pembangunan Kota Pangkal Pinang. Perubahan Renja Tahun 2024 disusun dengan mempedomani Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024-2026.

Atas tersusunya Perubahan Renja Tahun 2024 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkal Pinang ini kami ucapkan terimakasih kepada seluruh pihak atas peran dan masukanya.

Pangkalpinang, 2024
Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Daerah Kota Pangkal Pinang



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD), adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Organisasi Perangkat Daerah, Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkal Pinang mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan OPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2024.
3. Renja OPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2024 merupakan tahun pertama pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Mengingat arti strategis dokumen Renja OPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja OPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, antara lain:

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RPD tahun berkenaan.
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi tahun pertama RPD paruh ke dua dari RPJP-D Kota Pangkal Pinang Tahun 2007-2027 dan Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026 serta Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024-2026.
3. Program dan kegiatan dalam Renja OPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 Nomor 6 Tahun 1956 Nomor 5 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2020 Nomor 1);
13. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023 Nomor 144).
14. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 8 Tahun 2024 tentang APBD Kota Pangkal Pinang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024);
15. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 22 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 157);
16. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 166).

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2024, dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Perubahan Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran (RKA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkal Pinang, sedangkan tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja OPD adalah untuk memasukkan program/kegiatan yang ada di Perubahan Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PAS) Tahun 2024.

1.3 Sistematika RENJA

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 mencakup perumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, target kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, target kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan.

Sistematika Perubahan Renja Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:

BAB I Pendahuluan

BAB II Hasil evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra BKPSDMD Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II tahun 2024 ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah) serta memuat permasalahan dan hambatan yang dihadapi. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkal Pinang pada Tahun 2024 melaksanakan 3 (Tiga) program dan 13 (Tiga Belas) kegiatan dan 44 (Empat Puluh Empat) sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 9.514.218.242,- (Sembilan Milyar Lima Ratus Empat Belas Juta Dua Ratus Delapan Belas Ribu Dua Ratus Empat puluh Dua Rupiah). Secara rinci diuraikan sebagai berikut :

TRIWULAN II
Evaluasi Terhadap Hasil Renja
Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kota Pangkalpinang Tahun 2024

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							I		II		III		IV						
							7	8	9	10	11		12						
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	-	050301	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	85	15.654.239.299	84,530	663.144.600	88,430	1.390.412.476	0	0	0	0	88,430	2.053.557.076	100	13,118	Sekretariat
				Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	77,500		77,450		77,450		0	0	0	0	77,450		99,935		Sekretariat
2		050301201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyampaian dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja perangkat daerah tepat waktu (Dengan Satuan:%)	100	10.281.000	25	0	50	3.571.800	0	0	0	0	50	3.571.800	50	34,742	Kasubbag PEP dan Keuangan
3		050301201001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	3	1.427.100	0	0	3	1.362.100	0	0	0	0	3	1.362.100	100	95,445	Kasubbag PEP dan Keuangan
4		050301201002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dengan Satuan: Dokumen)	1	1.390.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kasubbag PEP dan Keuangan
5		050301201003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordniasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1.340.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kasubbag PEP dan Keuangan
6		050301201004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dengan Satuan: Dokumen)	1	1.348.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kasubbag PEP dan Keuangan

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2024	Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab				
						I		II		III		IV								
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13	
7		050301201005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1.311.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kasubbag Keuangan	PEP dan
8		050301201006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	2	1.613.200	0	0	2	1.559.700	0	0	0	0	2	1.559.700	100	96,684	Kasubbag Keuangan	PEP dan
9		050301201007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	3	1.849.800	0	0	3	650.000	0	0	0	0	3	650.000	100	35,139	Kasubbag Keuangan	PEP dan
10		050301202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya laporan keuangan perangkat daerah sesuai SAP (Dengan Satuan:%)	100	15.033.129.327	25	585.782.722	50	1.213.854.606	0	0	0	0	50	1.799.637.328	50	11,971	Kasubbag Keuangan	PEP dan
11		050301202001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	34	15.029.483.727	28	585.782.722	29	1.212.992.606	0	0	0	0	29	1.798.775.328	85,294	11,968	Kasubbag Keuangan	PEP dan
12		050301202005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1	1.661.000	0	0	1	862.000	0	0	0	0	1	862.000	100	51,896	Kasubbag Keuangan	PEP dan
13		050301202007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1	1.984.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kasubbag Keuangan	PEP dan
14		050301203	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah yang ditata dan diinventarisir (Dengan Satuan:%)	100	1.570.100	25	0	50	0	0	0	0	0	50	0	50	0	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
15		050301203001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1.570.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
16		050301205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin ASN (Dengan Satuan:%)	0	30.000.000	0	11.600.000	0	5.800.000	0	0	0	0	0	17.400.000	0	58,000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2024	Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab			
						I		II		III		IV							
						6		7		8		9					10		11
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
17		050301205009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Dengan Satuan:Orang)	4	30.000.000	4	11.600.000	6	5.800.000	0	0	0	0	6	17.400.000	100	58,000	Kasubbag Umum dan Kepegawalan
18		050301206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah (Dengan Satuan:%)	100	182.540.800	25	18.808.550	50	75.464.566	0	0	0	0	50	94.273.116	50	51,645	Kasubbag Umum dan Kepegawalan
19		050301206001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	7.498.000	0	0	1	1.554.000	0	0	0	0	1	1.554.000	100	20,726	Kasubbag Umum dan Kepegawalan
20		050301206003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	2	1.734.100	0	0	1	250.000	0	0	0	0	1	250.000	50	14,417	Kasubbag Umum dan Kepegawalan
21		050301206004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	2	11.879.200	0	0	2	5.515.000	0	0	0	0	2	5.515.000	100	46,426	Kasubbag Umum dan Kepegawalan
22		050301206005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	11.429.500	0	0	1	2.910.000	0	0	0	0	1	2.910.000	100	25,460	Kasubbag Umum dan Kepegawalan
23		050301206009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1	150.000.000	0	18.808.550	0	65.235.566	0	0	0	0	0	84.044.116	0	56,029	Kasubbag Umum dan Kepegawalan
24		050301208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (Dengan Satuan:%)	100	275.864.376	25	34.733.848	50	71.268.580	0	0	0	0	50	106.002.428	50	38,426	Kasubbag Umum dan Kepegawalan
25		050301208002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	1	87.281.000	0	10.862.152	0	14.975.036	0	0	0	0	0	25.837.188	0	29,602	Kasubbag Umum dan Kepegawalan
26		050301208003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	1	25.591.000	0	0	0	8.286.000	0	0	0	0	0	8.286.000	0	32,379	Kasubbag Umum dan Kepegawalan

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab		
							I		II		III		IV								
					1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
27		050301208004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	1	162.992.376	0	23.871.696	0	48.007.544	0	0	0	0	0	71.879.240	0	44,100			Kasubbag Umum dan Kepegawaian
28		050301209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik perangkat daerah dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)	100	120.853.696	25	12.219.480	50	20.452.924	0	0	0	0	50	32.672.404	50	27,035			Kasubbag Umum dan Kepegawaian
29		050301209001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)	1	40.241.000	1	2.000.000	1	2.300.000	0	0	0	0	1	4.300.000	100	10,686			Kasubbag Umum dan Kepegawaian
30		050301209002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	4	59.341.000	4	6.840.864	4	11.085.000	0	0	0	0	4	17.925.864	100	30,208			Kasubbag Umum dan Kepegawaian
31		050301209009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	1	21.271.696	1	3.378.616	1	7.067.924	0	0	0	0	1	10.446.540	100	49,110			Kasubbag Umum dan Kepegawaian
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																			99,968	13,118	
PREDIKAT KINERJA																			ST	SR	
32	-	050302	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Rasio pegawai fungsional (Dengan Satuan:%)	26	1.232.890.414	27	57.607.544	29	327.216.635	0	0	0	0	29	384.824.179	100	31,213			Perencanaan, Pengadaan, Mutasi dan Data
				Rasio jabatan fungsional yang bersertifikat kompetensi (Dengan Satuan:%)	47		39		39		0	0		39		82,979					Perencanaan, Pengadaan, Mutasi dan Data
				Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/ dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) (Dengan Satuan:%)	100		83		83,050		0	0		83,050		83,050					Perencanaan, Pengadaan, Mutasi dan Data
				Persentase data ASN yang melaksanakan pengembangan kompetensi ASN (Dengan Satuan:%)	7		0		0		0	0		0		0					Perencanaan, Pengadaan, Mutasi dan Data

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2024	Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab			
						I		II		III		IV							
						6		7		8		9					10		11
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Persentase data pegawai yang mendapatkan penghargaan (Dengan Satuan:%)	92		0		0		0	0		0		0			Perencanaan, Pengadaan, Mutasi dan Data
33		050302201	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase tersusunnya dokumen pelaksanaan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN (Dengan Satuan:%)	100	730.110.664	27	39.047.544	55	235.882.634	0	0	0	0	55	274.930.178	55,000	37,656	Sub Koordinator Pendidikan dan Pelatihan
34		050302201001	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN (Dengan Satuan:Dokumen)	1	147.497.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sub Koordinator Perencanaan, Data dan informasi
35		050302201002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN (Dengan Satuan:Dokumen)	1	34.145.400	0	1.640,000	0	12.339.230	0	0	0	0	0	13.979.230	0	40,940	Sub Koordinator Perencanaan, Data dan Informasi
36		050302201003	Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK (Dengan Satuan:Dokumen)	1	19.938.600	0	0	0	16.392.175	0	0	0	0	0	16.392.175	0	82,213	Sub Koordinator Perencanaan, Data dan informasi
37		050302201006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian (Dengan Satuan:Dokumen)	80	27.206.400	0	0	0	10.467.116	0	0	0	0	0	10.467.116	0	38,473	Sub Koordinator Perencanaan, Data dan Informasi
38		050302201008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi (Dengan Satuan:Lembaga)	1	163.764.900	0	0	0	96.239.500	0	0	0	0	0	96.239.500	0	58,767	Sub Koordinator Perencanaan, Data dan informasi
39		050302201009	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN (Dengan Satuan:Dokumen)	3.100	265.303.064	0	37.407.544	0	76.387.713	0	0	0	0	0	113.795.257	0	42,893	Sub Koordinator Perencanaan, Data dan Informasi
40		050302201010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dengan Satuan:Dokumen)	1	32.999.800	0	0	0	606.000	0	0	0	0	0	606.000	0	1,836	Sub Koordinator Perencanaan, Data dan informasi
41		050302201011	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian (Dengan Satuan:Dokumen)	3	39.255.200	0	0	0	23.450.900	0	0	0	0	0	23.450.900	0	59,740	Sub Koordinator Perencanaan, Data dan Informasi

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							I		II		III		IV						
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13
42		050302202	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase tersusunnya dokumen pelaksanaan mutasi dan promosi ASN (Dengan Satuan:%)	100	233.111.250	25	0	43	59.893.485	0	0	0	0	43	59.893.485	43	25,693	Sub Koordinator Mutasi dan Pemberhentian
43		050302202001	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	3	94.149.400	0	0	0	5.293.140	0	0	0	0	0	5.293.140	0	5,622	Sub Koordinator Mutasi dan Pemberhentian
44		050302202002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (Dengan Satuan:Dokumen)	600	83.207.350	0	0	0	49.842.305	0	0	0	0	0	49.842.305	0	59,901	Sub Koordinator Mutasi dan Pemberhentian
45		050302202003	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN (Dengan Satuan:Dokumen)	7	55.754.500	0	0	0	4.758.040	0	0	0	0	0	4.758.040	0	8,534	Sub Koordinator Mutasi dan Pemberhentian
46		050302203	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase tersusunnya dokumen ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi (Dengan Satuan:%)	100	209.291.300	19	16.510.000	28	17.145.316	0	0	0	0	28	33.655.316	28,000	16,081	Sub Koordinator Pengadaan dan Pengangkatan
47		050302203001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya (Dengan Satuan:Orang)	100	20.345.400	1	0	11	0	0	0	0	0	11	0	11	0	Sub Koordinator Pengadaan dan Pengangkatan
48		050302203003	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN (Dengan Satuan:Dokumen)	1	32.310.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sub Koordinator Pengadaan dan Pengangkatan
49		050302203004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan (Dengan Satuan:Orang)	7	94.756.400	3	14.460.000	3	8.492.006	0	0	0	0	3	22.952.006	42,857	24,222	Sub Koordinator Pengadaan dan Pengangkatan
50		050302203007	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN (Dengan Satuan:Laporan)	1	36.848.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sub Koordinator Pengadaan dan Pengangkatan
51		050302203014	Facilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir (Dengan Satuan:Orang)	50	25.030.800	15	2.050.000	24	8.653.310	0	0	0	0	24	10.703.310	48	42,761	Sub Koordinator Pengadaan dan Pengangkatan
52		050302204	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Jumlah laporan hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja Aparatur yang tersusun (Dengan Satuan:%)	100	60.377.200	19	2.050.000	50	14.295.200	0	0	0	0	50	16.345.200	50	27,072	Sub Koordinator Perencanaan, Data dan Informasi

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab		
							I		II		III		IV								
					1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
53		050302204002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Dengan Satuan:Dokumen)	3.100	21.015.800	0	0	0	724.000	0	0	0	0	0	724.000	0	3,445	Sub Koordinator Perencanaan, Data dan informasi		
54		050302204004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan (Dengan Satuan:Orang)	200	16.568.500	0	0	0	820.000	0	0	0	0	0	820.000	0	4,949	Sub Koordinator Perencanaan, Data dan Informasi		
55		050302204008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN (Dengan Satuan:Laporan)	3	22.792.900	0	2.050.000	0	12.751.200	0	0	0	0	0	14.801.200	0	64,938	Sub Koordinator Perencanaan, Data dan informasi		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																	53,206	31,213			
PREDIKAT KINERJA																	R	SR			
56	-	050402	P R O G R A M PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (Dengan Satuan:%)	30	1.123.655.700	25,740	77.560.000	25,740	104.616.872	0	0	0	0	25,740	182.176.872	85,800	16,213	Pendidikan Pelatihan, Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai		
				Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural (Dengan Satuan:%)	33		26,290		26,290		0	0		26,290			79,667		Pendidikan Pelatihan, Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai		
57		050402201	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase jumlah dokumen ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi (Dengan Satuan:%)	100	93.211.500	15	0	25	1.640.000	0	0	0	0	25	1.640.000	25	1,759	Sub Koordinator Pengembangan dan Sertifikasi		
58		050402201003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi (Dengan Satuan:Orang)	70	93.211.500	0	0	0	1.640.000	0	0	0	0	0	1.640.000	0	1,759	Sub Koordinator Pengembangan dan Sertifikasi		
59		050402202	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional (Dengan Satuan:%)	100	1.030.444.200	30	77.560.000	63	102.976.872	0	0	0	0	63	180.536.872	63	17,520	Sub Koordinator Pengembangan dan Sertifikasi		

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
60		050402202007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan (Dengan Satuan:Laporan)	1	1.030.444.200	0	77.560.000	0	102.976.872	0	0	0	0	0	180.536.872	0	17,520	Sub Koordinator Pengembangan dan Sertifikasi	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																82,733	16,213			
PREDIKAT KINERJA																		T	SR	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN SEMUA PROGRAM (%)																		70,159	20,181	
PREDIKAT KINERJA																		S	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:				- Pelaksanaan sub kegiatan berjalan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan dan pelaksanaan pencairan keuangan disesuaikan dengan kebutuhan																
Faktor penghambat pencapaian kinerja:				- Pelaksanaan sub kegiatan dilaksanakan pada triwulan ke III																
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:				- Melaksanakan proses penilaian anggaran sub kegiatan sesuai dengan diadwalkan																
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kota berikutnya:				- Melaksanakan proses pencairan anggaran sub kegiatan sesuai dengan dijadwalkan																

**LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
SUMBER DANA APBD KOTA PANGKALPINANG TAHUN ANGGARAN 2024**

UNIT KERJA : BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA DAERAH
KOTA PANGKAL PINANG

BULAN		: TRIWULAN II											
NO	PROGRAM / KEGIATAN	KEGIATAN	VOL.	SATUAN	PLAFOND DANA (RP)		REALISASI		FISIK (%)	SUMBER DANA	KET		
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH REFOCUSING	KEUANGAN						
							RP	(%)					
KEPEGAWAIAN													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA													
1	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	1	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	3	DOKUMEN	1,427,100	1,362,100	95.45	100	APBD Kota PKP			
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			31,000	29,000						
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover			64,000	56,500						
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak			282,100	277,600						
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer			132,000	117,000						
			Belanja Lembur			918,000	882,000						
		2	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	1	DOKUMEN	1,390,700	-	0.00	40	APBD Kota PKP			
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			317,700							
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover			271,000							
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak			400,000							
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer			402,000							
		3	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	1	DOKUMEN	1,340,300	-	0.00	40	APBD Kota PKP			

		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			39,700						
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover			133,000						
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak			69,600						
		Belanja Lembur			1,098,000						
	4	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA- SKPD	1	DOKUMEN	1,348,400		-	0.00	40	APBD Kota PKP	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			59,800						
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover			69,000						
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak			107,600						
		Belanja Lembur			1,112,000						
	5	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	1	DOKUMEN	1,311,500		-	0.00	40	APBD Kota PKP	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			21,100						
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover			69,000						
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak			36,400						
		Belanja Lembur			1,185,000						
	6	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	2	LAPORAN	1,613,200	1,559,700	96.68		100	APBD Kota PKP	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			70,500	68,500					
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover			266,000	243,000					
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak			255,700	251,200					
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer			135,000	117,000					
		Belanja Lembur			886,000	880,000					
	7	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	3	LAPORAN	1,849,800	650,000	35.14		100	APBD Kota PKP	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			299,500						

			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover			133,000						
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak			239,300						
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer			528,000						
			Belanja Lembur			650,000		650,000				
2	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	34	ORANG	6,532,916,556		1,798,775,328	27.53	50	APBD Kota PKP	
			Belanja gaji pokok PNS			1,485,651,431	-	810,942,400				
			Belanja gaji pokok PPPK			29,533,210	-	9,610,800				
			Belanja tunjangan keluarga PNS			159,261,897	-	85,142,052				
			Belanja Tunjangan Keluarga PPPK			39,714,228	-	1,345,512				
			Belanja tunjangan jabatan PNS			132,515,331	-	72,200,000				
			Belanja tunjangan fungsional PNS			92,969,305	-	35,040,000				
			Belanja tunjangan fungsional PPPK			8,763,750	-	2,950,000				
			Belanja tunjangan fungsional umum PNS			30,482,834	-	8,830,000				
			Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK			14,820,000	-					
			Belanja tunjangan beras PNS			92,079,595	-	49,824,960				
			Belanja Tunjangan Beras PPPK			25,929,173	-	869,040				
			Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus PNS			3,289,318	-	1,722,734				
			Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus PPPK			922,500	-					
			Belanja pembulatan gaji PNS			31,127	-	12,086				
			Belanja Pembulatan Gaji PPPK			28,195	-	76				
			Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS			1,417,744,894	-	597,960,000				
			Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK			2,917,200,000	-	99,600,000				
			Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan			48,820,000	-	14,390,000				
			Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN			29,305,596	-	6,843,200				
			Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN			1,712,988	-	663,291				
			Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN			2,141,184	-	829,177				
		2	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	1	LAPORAN	1,661,000		862,000	51.90	100	APBD Kota PKP	
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			136,900						

			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover			133,000						
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak			368,100						
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer			135,000						
			Belanja Lembur			888,000		862,000				
		3	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	1	LAPORAN	1,984,600		-	0.00	75	APBD Kota PKP	
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			272,300						
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover			404,000						
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak			661,300						
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer			132,000						
			Belanja Lembur			515,000						
3	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	1	PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	1	DOKUMEN	1,570,100		-	0.00	50	APBD Kota PKP	
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			268,300						
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover			335,000						
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak			570,800						
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer			396,000						
4	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	1.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	1	PAKET	7,498,000		1,554,000	20.73	50	APBD Kota PKP	
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik			7,498,000		1,554,000				
		2.	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	2	PAKET	1,734,100		250,000	14.42	50	APBD Kota PKP	
			Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran			734,100		0				
			Belanja Bahan-Isi Tabung Gas			1,000,000		250,000				

		3.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	2	PAKET	11,879,200		5,515,000	46.43	50	APBD Kota PKP	
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			4,128,200	-	1,250,000				
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover			2,696,000	-	1,022,000				
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer			2,790,000		1,638,000				
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat			2,265,000		1,605,000				
		4.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	1	PAKET	11,429,500		2,910,000	25.46	50	APBD Kota PKP	
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak			11,429,500	-	2,910,000				
		5.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	1	LAPORAN	150,000,000		84,044,116	56.03	65	APBD Kota PKP	
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa			150,000,000	-	84,044,116				
5	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	1	LAPORAN	87,281,000		25,837,188	29.60	50	APBD Kota PKP	
			Belanja Tagihan Telepon			1,000,000	-	409,510				
			Belanja Tagihan Listrik			86,281,000	-	25,427,678				
		2.	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	1	LAPORAN	25,591,000		8,286,000	32.38	50	APBD Kota PKP	
			Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya			15,991,000	-	5,486,000				
			Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin			3,000,000	-	1,250,000				
			Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer			3,000,000	-	1,250,000				
			Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya			1,200,000	-	300,000				
			Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer			2,400,000	-					
		3.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	1	LAPORAN	162,992,376		71,879,240	44.10	50	APBD Kota PKP	

		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos			7,290,000	-	1,500,000				
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor			9,472,200	-	0				
		Belanja Jasa Tenaga Administrasi			124,358,480	-	59,732,700				
		Belanja Jasa Tenaga Kebersihan			21,271,696	-	10,446,540				
		Belanja Jasa Pengolahan Sampah			600,000	-	200,000				
6	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	1	UNIT	40,241,000		4,300,000	10.69	50	APBD Kota PKP	
		Belanja Jasa Tenaga Supir			21,931,696	-	0				
		Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan			1,315,000	-	0				
		Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan			16,994,304		4,300,000				
		2. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	4	UNIT	59,341,000		17,925,864	30.21	50	APBD Kota PKP	
		Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan			7,200,000	-	1,840,800				
		Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang			52,141,000	-	16,085,064				
		3. PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	1	UNIT	21,271,696		10,446,540	49.11	55	APBD Kota PKP	
		Belanja Jasa Tenaga Keamanan			21,271,696	-	10,446,540				
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH											
1	PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN ASN	1. PERUMUSAN BAHAN KEBIJAKAN PENGADAAN ASN	1	DOKUMEN	147,497,300		-	0.00	10	APBD Kota PKP	

		Belanja Bahan-Bahan Kimia			2,513,200						
		Belanja Bahan-Bahan Lainnya			1,070,000	-					
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			457,000						
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover			138,000						
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak			18,601,600						
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer			396,000						
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor			2,430,000						
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik			1,839,000						
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat			577,500						
		Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan			24,000,000						
		Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			2,000,000						
		Honorarium Penyelenggara Ujian			35,400,000						
		Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan			5,000,000						
		Belanja Paket/Pengiriman			500,000						
		Belanja Lembur			6,375,000						
		Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya			24,000,000						
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa			15,000,000						
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			7,200,000						
		2 PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN, JENIS DAN JUMLAH JABATAN UNTUK PELAKSANAAN PENGADAAN ASN	1	DOKUMEN	34,145,400		13,979,230	40.94	60	APBD Kota PKP	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			452,000						
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover			266,000		252,000				
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak			3,758,400						
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer			264,000		236,000				

		Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan			5,700,000						
		Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			5,700,000						
		Belanja Lembur			3,005,000						
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa			15,000,000		13,491,230				
	3	KOORDINASI DAN FASILITASI PENGADAAN PNS DAN PPPK	2	DOKUMEN	19,938,600		16,392,175	82.21	96	APBD Kota PKP	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			112,800		0				
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover			345,000		0				
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak			1,729,800						
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer			528,000						
		Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan			6,030,000		6,030,000				
		Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			800,000		800,000				
		Honorarium Rohaniawan			1,600,000		1,200,000				
		Belanja Lembur			3,793,000		3,462,000				
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa			5,000,000		4,900,175				
	4	KOORDINASI PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBERHENTIAN	80	DOKUMEN	27,206,400		10,467,116	38.47	58	APBD Kota PKP	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			262,800		0				
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover			330,000						
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak			1,948,600						
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer			405,000						
		Belanja Makanan dan Minuman Jamuan TamU			360,000						

		Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			8,900,000						
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa			15,000,000		10,467,116				
	5	FASILITASI LEMBAGA PROFESI ASN	1	LEMBAGA	163,764,900		96,239,500	58.77	75	APBD Kota PKP	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			352,100	-	283,200				
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover			388,000	-	355,500				
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak			2,413,800	-	1,495,800				
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer			1,056,000						
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya			11,805,000		11,700,000				
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat			27,600,000		20,205,000				
		Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			2,400,000		1,600,000				
		Belanja Jasa Juri			12,000,000		9,600,000				
		Perlombaan/Pertandingan									
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa			25,000,000						
		Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan			80,750,000		51,000,000				
	6	PERUMUSAN BAHAN KEBUJAKAN PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI ASN	3100	DOKUMEN	265,303,064		113,795,257	42.89	59	APBD Kota PKP	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			257,000	-	0				
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover			335,000		318000				
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak			1,788,800	-	0				

			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer			396,000		354,000				
			Belanja Jasa Tenaga Administrasi			233,445,264		108,329,552				
			Belanja Lembur			9,081,000						
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa			20,000,000		4793705				
		7	PENGLOLAAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAAN	1	DOKUMEN	32,999,800		606,000	1.84	47	APBD Kota PKP	
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			341,200						
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover			266,000		252,000				
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak			365,600						
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer			396,000		354,000				
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat			231,000						
			Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website			24,900,000						
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa			6,500,000						
		8	PENGLOLAAN DATA KEPEGAWAIAAN	3	DOKUMEN	39,255,200		23,450,900	59.74	62	APBD Kota PKP	
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			8,314,000		3,950,000				
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover			202,000	-	0				
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak			969,200	-	0				
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer			7,896,000		7,425,000				
			Belanja Lembur			6,874,000						
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa			15,000,000		12,075,900				
2	MUTASI DAN PROMOSI ASN	1.	PENGLOLAAN MUTASI ASN	3	DOKUMEN	94,149,400		5,293,140	5.62	53	APBD Kota PKP	
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			1,990,000	-	0				
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover			976,000	-	0				
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak			1,876,400						
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer			528,000	-	0				

		Belanja Makanan dan Minuman Rapat			3,000,000		0				
		Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu			360,000						
		Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			33,000,000						
		Honorarium Penyelenggara Ujian			25,600,000						
		Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan			5,000,000						
		Belanja Paket/Pengiriman			500,000						
		Belanja Lembur			6,319,000						
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa			15,000,000		5,293,140				
		2. PENGELOLAAN KENAikan PANGKAT ASN	600	DOKUMEN	83,207,350		49,842,305	59.90	62	APBD Kota PKP	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			334,800		0				
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover			266,000		0				
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak			3,458,550		0				
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer			396,000						
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat			900,000						
		Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu			360,000						
		Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan			2,250,000						
		Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			36,400,000		18,200,000				
		Belanja Lembur			8,842,000		8,716,000				
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa			30,000,000		22,926,305				
		3. PENGELOLAAN PROMOSI ASN	7	DOKUMEN	55,754,500		4,758,040	8.53	64	APBD Kota PKP	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			316,300		0				
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover			266,000		0				
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak			3,474,200						
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer			405,000						

[illegible]

			Belanja Perjalanan Dinas Biasa			18,000,000		10,952,006				
			Belanja Beasiswa			12,000,000		12,000,000				
			Belanja Beasiswa S1			20,000,000						
			Belanja Beasiswa S2			40,000,000						
		4	EVALUASI DIKLAT DAN SERTIFIKASI JABATAN ASN	1	LAPORAN	36,848,600		0	0.00	19	APBD Kota PKP	
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			2,199,600						
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover			507,000						
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak			1,121,000						
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer			270,000						
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat			11,025,000						
			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			11,200,000						
			Belanja Lembur			526,000						
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa			10,000,000						
		5	FASILITASI PENGEMBANGAN KARIR DALAM JABATAN FUNGSIONAL	50	ORANG	25,030,800		10,703,310	42.76	60	APBD Kota PKP	
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			280,400						
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover			192,000						
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak			1,705,400						
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer			528,000						
			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			3,200,000						
			Belanja Lembur			4,125,000						
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa			15,000,000		10,703,310				
4	PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR	1.	PELAKSANAAN PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR	3100	DOKUMEN	21,015,800		724,000	3.45	51	APBD Kota PKP	
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			199,800		0				
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover			266,000		252,000				

		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer			528,000		472,000				
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat			9,000,000						
		Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			5,700,000						
		Belanja Lembur			5,322,000						
		2. PENGELOLAAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI	200	ORANG	16,568,500		820,000	4.95	65	APBD Kota PKP	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			442,200		0				
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover			556,000						
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak			570,300						
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa			15,000,000		820,000				
		3. PENGELOLAAN PENYELESAIAN PELANGGARAN DISIPLIN ASN	3	LAPORAN	22,792,900		14,801,200	64.94	65	APBD Kota PKP	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			174,800		0				
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover			283,700		0				
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak			1,206,400						
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer			528,000						
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat			1,800,000						
		Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			3,800,000						
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa			15,000,000		14,801,200				
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN											
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
1	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	1. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	4	ORANG	30,000,000		17,400,000	58.00	80	APBD Kota PKP	
		Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi			30,000,000		17,400,000				

PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA											
1	PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS	1	PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS UMUM, INTI, DAN PILIHAN BAGI JABATAN ADMINISTRASI PENYELENGGARA URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN, PERANGKAT DAERAH PENUNJANG, DAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	70	ORANG	93,211,500		1,640,000	1.76	30	APBD Kota PKP
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			1,356,300		0			
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover			665,000					
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak			1,049,200					
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer			641,000					
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat			4,500,000					
			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			5,000,000					
			Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi			68,000,000					
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa			12,000,000		1,640,000			
2	SERTIFIKASI, KELEMBAGAAN, PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJERIAL DAN FUNGSIONAL	1	PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI PIMPINAN DAERAH, JABATAN PIMPINAN TINGGI, JABATAN FUNGSIONAL, KEPEMIMPINAN, DAN PRAJABATAN	1	LAPORAN	1,030,444,200		180,536,872	17.52	70	APBD Kota PKP
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			3,083,200					
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover			490,000					
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak			1,400,000					
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer			610,000					
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat			2,760,000					
			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			110,200,000					
			Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi			710,782,000		120,990,000			
			Belanja Lembur			1,578,000					
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa			199,541,000		59,546,872			
Total sampai dengan bulan ini						9,514,218,242		2,620,558,127	28	56	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BKPSDMD

Analisis kinerja pelayanan BKPSDMD Kota Pangkal Pinang adalah analisis terhadap capaian kinerja serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk menyusun program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkal Pinang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkal Pinang sebagai penyelenggara pemerintahan di bidang kepegawaian merupakan lembaga teknis yang sangat strategis dalam rangka melaksanakan manajemen kepegawaian di daerah khususnya di Pemerintah Kota Pangkal Pinang. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang dan berdasarkan Peraturan Walikota Pangkal Pinang Nomor 9 Tahun 2023, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkal Pinang mempunyai tugas pokok **“Melaksanakan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan”**, dan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
2. Penetapan rencana strategis badan untuk mendukung visi dan misi Kota Pangkal Pinang dan kebijakan Walikota;
3. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Kota Pangkal Pinang bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
4. Penetapan rencana kerja badan menurut skala prioritas dan mendistribusikannya kepada bawahan;
5. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
6. Pelaksanaan perencanaan bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
7. Pengkoordinasian dan pelaksanaan dibidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah di lingkungan Kota termasuk dukungan dana, sarana dan prasarana Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah;
8. Pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan tahun 2024, maka dapat diuraikan analisis kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkal Pinang pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkal Pinang

No	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD (2023)	Capaian Kinerja																		SKPD Penanggung jawab	
			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Kondisi kinerja pada akhir periode RPD				
			target	realisasi	%	target	realisasi	%	target	realisasi	%	target	realisasi	%	target	realisasi	%	target	realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN																					
1.	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100	-	-	-	100	3.90	100	100	0.825	82.5	100	N/A	N/A	83	N/A	N/A	83	N/A	N/A		
2.	Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	7.8	-	-	-	7.05	0.233	23.33	7.05	0.212	21.2	7.8	N/A	N/A	22	N/A	N/A	22	N/A	N/A		
3.	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak Termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100	-	-	-	100	0.36	36	100	0.45	45	100	N/A	N/A	47	N/A	N/A	47	N/A	N/A		
4.	Persentase ASN yang mempunyai kapasitas dan kompetensi	79	-	-	-	77	1.22	100	78	39.31	50.39	79	N/A	N/A	-	-	-	-	-	-		
5.	Persentase ASN yang mengikuti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	N/A	N/A	29	N/A	N/A		

	pendidikan dan pelatihan formal																				
6.	Persentase jumlah event yang dilaksanakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	N/A	N/A	100	N/A	N/A	
7.	Persentase data ASN yang melaksanakan pengembangan kompetensi ASN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	N/A	N/A	5	N/A	N/A	
8.	Persentase data pegawai yang mendapatkan penghargaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91	N/A	N/A	91	N/A	N/A	
9.	Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	N/A	N/A	25	N/A	N/A	
10.	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	2.6	1.47	56.54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.	Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	61.50	35.68	58.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12.	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	32	23	71.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13.	jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	116	113	97.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

14.	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	1.728	1.728	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-----	--	-------	-------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

NO	Indikator	SPM/ standar Nasional	IKK	Target Renstra OPD					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (thn n)	Tahun 2023 (thn n+1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	Tahun 2026 (thn n)	Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)			100	100	83	84	85	82.5%	N/A	83	84	
2	Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)			7.5	7.8	22	23	24	21.2%	N/A	22	23	
3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak Termasuk guru dan tenaga kesehatan)			100	100	47	49	50	45%	N/A	47	49	
4	Persentase ASN yang mempunyai kapasitas dan kompetensi			78	79	0	0	0	50.39%	N/A	0	0	
5	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal			0	0	30	31	33	0	0	30	31	
6	Persentase jumlah event yang dilaksanakan			0	0	100	100	100	0	0	100	100	
7	Persentase data ASN yang melaksanakan pengembangan kompetensi ASN			0	0	7	8	8	0	0	7	8	

8	Persentase data pegawai yang mendapatkan penghargaan			0	0	92	93	94	0	0	92	93	
9	Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural			0	0	33	33	37	0	0	33	33	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKPSDMD

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan tupoksi BKPSDMD, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dalam mengambil strategi dan arah kebijakan harus memperhatikan isu-isu strategis di bidang kepegawaian, adapun isu-isu strategis tersebut antara lain :

1. Peningkatan Kualitas SDM Aparatur
2. Penempatan Pegawai Secara Lebih Optimal Sesuai Kompetensi Serta Analisa Beban Kerja Dan Analisa Jabatan
3. Peningkatan Disiplin Pegawai
4. Digitalisasi Pelayanan Administrasi Kepegawaian
5. Peningkatan Akurasi Data Pegawai
6. Peningkatan Kinerja SDM Aparatur
7. Sistem Kinerja Aparatur Sipil Negara (*Flexibel Working Arrangement*)

Selain isu-isu penting di atas, ada beberapa hal yang mempengaruhi penyelenggaraan tupoksi OPD antara lain :

Permasalahan :

1. Aparatur Sipil Negara tidak terdistribusi berdasarkan kompetensi, keahlian dengan bidang tugas masing-masing (distribusi dan alokasi).
2. Ketidaksesuaian pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja terhadap jabatan.
3. Belum dilakukannya pengembangan berbasis kompetensi dan pendidikan dan pelatihan formal kepada seluruh pegawai dikarenakan keterbatasan anggaran.
4. Promosi terbuka hanya terbatas pada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
5. Capaian kinerja belum dijadikan dasar pembayaran tunjangan kinerja.
6. Absensi belum terintegrasi dengan sistem pembayaran tunjangan kinerja pegawai
7. Masih adanya kasus pelanggaran disiplin dan kode etik.
8. Arsip data pegawai dari PNS masih belum masuk semuanya ke BKPSDMD.

Penghambat :

1. Perumusan kebijakan di bidang kepegawaian belum optimal.
2. Penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan kompetensi.
3. Pemanfaatan teknologi informasi belum optimal.

Pendorong :

1. Adanya kesempatan untuk pengembangan kompetensi pegawai.
2. Adanya kemajuan teknologi informasi yang sangat pesat.
3. Adanya kewenangan dalam manajemen dibidang kepegawaian.

Kekuatan :

Sedangkan kekuatan (*strenght*) yang ada pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkal Pinang antara lain :

1. Komitmen pimpinan pada penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance)
2. Tersedianya sarana dan prasarana baik fisik maupun personil untuk penilaian kinerja ASN (Assessment center).
3. SDM Pengelola Kepegawaian yang berkompeten.
4. Pengembangan/dukungan sistem informasi yang terus dilakukan

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RPD

Review terhadap rancangan akhir RPD dapat dilihat pada tabel 2.3 di bawah ini.

RIVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RPD TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KOTA PANGKAL PINANG

RANCANGAN AWAL RPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU TAHUN 2024	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU TAHUN 2024
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	85 Nilai	4,448,267,264	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	85 Nilai	4,448,267,264
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	77.50 Nilai			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	77.50 Nilai	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyampaian dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja perangkat daerah tepat waktu Perangkat Daerah Sesuai SAP	100%	12,251,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyampaian dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja perangkat daerah tepat waktu Perangkat Daerah Sesuai SAP	100%	12,251,000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	1,427,100	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	1,427,100
Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2,760,700	Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2,760,700
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1,540,300	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1,540,300

Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1,548,400	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1,548,400
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1,511,500	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1,511,500
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	1,613,200	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	1,613,200
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	1,849,800	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	1,849,800
Kegiatan Administrasi Keuangan	Persentase Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah Sesuai SAP	100%	3,584,906,064	Kegiatan Administrasi Keuangan	Persentase Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah Sesuai SAP	100%	3,584,906,064
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang/Bulan	3,581,260,464	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang/Bulan	3,581,260,464
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1,661,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1,661,000

Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	1 Laporan	1,984,600	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	1 Laporan	1,984,600
Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik perangkat daerah yang ditata dan diinventarisir	100%	1,570,100	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik perangkat daerah yang ditata dan diinventarisir	100%	1,570,100
Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	1 Dokumen	1,570,100	Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	1 Dokumen	1,570,100
Kegiatan Administrasi umum	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	232,540,800	Kegiatan Administrasi umum	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	232,540,800
Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	11,429,500	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	11,429,500
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	11,879,200	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	11,879,200
Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	1,734,100	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	1,734,100
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7,498,000	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7,498,000
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	200,000,000	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	200,000,000

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	281,864,376	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	281,864,376
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	87,281,000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	87,281,000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	25,591,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	25,591,000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	168,992,376	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	168,992,376
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Perangkat Daerah	100%	200,000,000	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Perangkat Daerah	100%	200,000,000
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	9 Unit	-	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	9 Unit	-
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	-
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit	-	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit	-
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	200,000,000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	200,000,000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	-

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	100%	117,754,924	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	100%	117,754,924
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	68,941,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	68,941,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	26,542,228	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	26,542,228
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	22,271,696	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	22,271,696
Kegiatan Administrasi Kepegawaian	Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin ASN	0%	17,400,000	Kegiatan Administrasi Kepegawaian	Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin ASN	0%	17,400,000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	17,400,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	17,400,000

PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/ dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100%	1,236,336,588	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/ dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100%	1,236,336,588
	Rasio pegawai fungsional	26%			Rasio pegawai fungsional	26%	
	Persentase data ASN yang melaksanakan pengembangan kompetensi ASN	7%			Persentase data ASN yang melaksanakan pengembangan kompetensi ASN	7%	
	Persentase data pegawai yang mendapatkan penghargaan	92%			Persentase data pegawai yang mendapatkan penghargaan	93%	
	Persentase jumlah event yang dilaksanakan	100%			Persentase jumlah event yang dilaksanakan	100%	
	Rasio jabatan fungsional yang bersertifikat kompetensi.	47%			Rasio jabatan fungsional yang bersertifikat kompetensi.	47%	
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase tersusunnya dokumen pelaksanaan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN	100%	723,866,584	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase tersusunnya dokumen pelaksanaan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN	100%	723,866,584
Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	1 Dokumen	147,497,300	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	1 Dokumen	147,497,300
Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	23,070,000	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	23,070,000

Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	19,938,600	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	19,938,600
Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1 Dokumen	18,107,400	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1 Dokumen	18,107,400
Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	163,764,900	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	163,764,900
Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	1 Dokumen	277,437,264	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	1 Dokumen	277,437,264
Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	32,403,200	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	32,403,200
Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dokumen	41,647,920	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dokumen	41,647,920
Mutasi dan Promosi ASN	Persentase tersusunnya dokumen pelaksanaan mutasi dan promosi ASN	100%	219,311,300	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase tersusunnya dokumen pelaksanaan mutasi dan promosi ASN	100%	219,311,300
Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	1 Dokumen	87,122,800	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	1 Dokumen	87,122,800

Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1 Dokumen	91,728,000	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1 Dokumen	91,728,000
Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen	40,460,500	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen	40,460,500
Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase tersusunnya dokumen ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi Persentase tersusunnya dokumen ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	100%	230,953,904	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase tersusunnya dokumen ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi Persentase tersusunnya dokumen ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	100%	230,953,904
Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	50 Orang	26,073,704	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	50 Orang	26,073,704
Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	1 Dokumen	32,150,100	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	1 Dokumen	32,150,100
Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	7 Orang	99,606,400	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	7 Orang	99,606,400
Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	1 Laporan	36,661,600	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	1 Laporan	36,661,600
Facilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	50 Orang	36,462,100	Facilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	50 Orang	36,462,100
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Jumlah laporan hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja Aparatur yang tersusun	100%	62,204,800	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Jumlah laporan hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja Aparatur yang tersusun	100%	62,204,800
Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	21,149,800	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	21,149,800

Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	70 Orang	16,568,500	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	70 Orang	16,568,500
Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1 Laporan	24,486,500	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1 Laporan	24,486,500
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	30%	1,133,775,700	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	30%	1,133,775,700
	Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	33%			Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	33%	
Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase jumlah dokumen ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	100%	97,091,500	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase jumlah dokumen ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	100%	97,091,500
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	70 Orang	97,091,500	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	70 Orang	97,091,500
Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	100%	1,036,684,200	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	100%	1,036,684,200
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1 Laporan	1,036,684,200	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1 Laporan	1,036,684,200
			6,818,399,552				6,818,399,552

BAB III

TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran dari misi yang hendak dicapai dalam jangka waktu Tiga (3) tahun. Tujuan yang ditetapkan atas dasar pernyataan visi dan misi Kepala Daerah terpilih sehingga dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam jangka waktu satu sampai dengan Tiga tahun kedepan. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan memiliki indikator kinerja yang terukur. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkal Pinang dalam kurun waktu tahun 2024-2026 yaitu :

“Meningkatkan Indeks Profesional Aparatur Sipil Negara (ASN)”

3.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkal Pinang dalam kurun waktu tahun 2024-2026 yaitu :

“Meningkatnya Penataan ASN sesuai dengan Kebutuhan dan Kompetensi”

Tujuan dan sasaran jangka menengah BKPSDMD dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkal Pinang

No	Tujuan OPD	Sasaran OPD	Indikator Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Realisasi	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Jangka Menengah			Kondisi Akhir RPD
						2022	2024	2025	2026	
1.	Meningkatkan Indeks Profesional Aparatur Sipil Negara (ASN)		Indeks Profesional ASN	Nilai indeks profesional ASN kota hasil penilaian BKN	Nilai	48.13	49	50	51	51
2.		Meningkatnya Penataan ASN Sesuai dengan Kebutuhan dan Kompetensi	Persentase ASN yang Ditempatkan sesuai dengan Kebutuhan dan Kompetensi	Jumlah jabatan struktural dan fungsional yang diisi oleh ASN yang sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi dibagi jumlah jabatan struktural dan fungsional yang terisi	%	80	80	81	82	82

Tabel 3.2
Indikator Kinerja BKPSDMD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD
Tahun 2024-2026

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Tahun			Kondisi Akhir RPD
		2022	2024	2025	2026	
Indeks Profesional ASN	Nilai	48.13	49	50	51	51
Persentase ASN yang ditempatkan sesuai kebutuhan dan kompetensi	%	80	80	81	82	82
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	77.04	77.50	77.80	78	78
Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	%	NA	85	90	95	95
Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	100	100	100	100	100
Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	25	26	28	30	30
Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak Termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	45	47	49	50	50
Persentase jumlah event yang dilaksanakan	%	100	100	100	100	100
Persentase data ASN yang melaksanakan pengembangan kompetensi ASN	%	5	7	8	8	8

Persentase data pegawai yang mendapatkan penghargaan	%	91	92	93	94	94
Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Formal	%	29	30	31	33	33
Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	25	33	33	37	37

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan merupakan strategi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan visi misi. Program dan kegiatan merupakan proses penentuan jumlah dan sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana selain itu juga merupakan penjabaran rinci tentang langkah-langkah yang diambil dalam melaksanakan kebijakan. Pada tahun 2024 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkal Pinang merencanakan 3 (Tiga) program dijabarkan dalam 13 (Tiga Belas) kegiatan dan 44 (Empat Puluh Empat) sub kegiatan.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Program

Pada Tahun 2024, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia akan melaksanakan program sebagai berikut :

1. Program Prioritas, dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah yang terdiri dari:
 - Program Kepegawaian Daerah
 - Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
2. Program Pendukung, yaitu :
 - Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

4.2 Rencana Kegiatan

1. Kegiatan Prioritas
 - 1) Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian ASN, dengan sub kegiatan:
 - a. Perumusan bahan kebijakan Pengadaan ASN
 - b. Penyusunan rencana kebutuhan, jenis, dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN.
 - c. Koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian
 - d. Fasilitasi lembaga profesi ASN
 - e. Perumusan bahan kebijakan pengelolaan data dan informasi ASN
 - f. Pengelolaan sistem informasi kepegawaian
 - g. Pengelolaan data kepegawaian
 - h. Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
 - 2) Mutasi dan Promosi ASN, dengan sub kegiatan:
 - a. Pengelolaan mutasi ASN
 - b. Pengelolaan kenaikan pangkat ASN
 - c. Pengelolaan promosi ASN
 - 3) Pengembangan Kompetensi ASN, dengan sub kegiatan :
 - a. Peningkatan kapasitas kinerja ASN
 - b. Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN
 - c. Pengelolaan pendidikan lanjutanASN

- d. Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN
- e. Fasilitasi pengembangan karir dalam jabatan fungsional
- 4) Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, dengan sub kegiatan :
 - a. Pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur
 - b. Pengelolaan pemberian penghargaan bagi pegawai
 - c. Pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN
- 5) Pengembangan Kompetensi teknis, dengan sub kegiatan :
 - a. Penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis umum, inti dan pilihan bagi Jabatan administrasi penyelenggaraan urusan Pemerintah konkuren, Perangkat Daerah penunjang, dan urusan Pemerintahan Umum.
- 6) Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional, dengan sub kegiatan:
 - a. Penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan.
- 2. Kegiatan Pendukung
 - 1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - a. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
 - b. Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD
 - c. Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD
 - d. Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD
 - e. Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD
 - f. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 - g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - a. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD
 - 3) Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD
 - 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - a. Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi

- 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - b. Penyediaan peralatan rumah tangga
 - c. Penyediaan bahan logistik kantor
 - d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - e. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
- 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - b. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
 - c. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
- 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :
 - a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
 - b. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
 - c. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA PANGKAL PINANG
TAHUN 2024

[illegible]

BAB V PENUTUP

Sebagai upaya untuk meningkatkan dan menciptakan kinerja pemerintah yang lebih efektif, optimal dan mencapai sasaran yang diinginkan, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkal Pinang selaku unsur pelaksana Pemerintah Daerah menyusun Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024. Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 nantinya akan menjadi bahan untuk penetapan Rencana Kerja Definitif Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024. Dalam Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkal Pinang merencanakan 3 (tiga) program dijabarkan dalam 13 (Tiga Belas) kegiatan dan 44 (Empat Puluh Empat) sub kegiatan.

Sebagai penutup, apabila ada hal-hal yang kurang sesuai dengan harapan, maka kami bersedia menerima saran agar untuk tahun mendatang akan diadakan evaluasi dan pembenahan dengan tetap memperhatikan kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi OPD sebagai OPD pengelola kepegawaian Kota Pangkal Pinang.